

**PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA
BADAN USAHA MILIK DESA**

(Skripsi)

Oleh

M RIZKY RICO SAPUTRA

2151031026



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA
BADAN USAHA MILIK DESA**

Oleh

M RIZKY RICO SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA

Oleh

M RIZKY RICO SAPUTRA

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dampak dari penggunaan pembayaran digital, kejelasan sasaran anggaran, serta sistem pelaporan terhadap tingkat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang masalah berawal dari fakta bahwa capaian kinerja BUMDes secara nasional, termasuk di wilayah tersebut, masih tergolong rendah. Sebagian besar BUMDes bahkan masih berada pada tahap kategori perintis dan pemula. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kuantitatif dengan strategi survei menggunakan instrumen kuesioner, yang disebarkan kepada 77 orang pengelola BUMDes yang memenuhi syarat sebagai sampel. Pengolahan data dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) memanfaatkan aplikasi SmartPLS 4.0. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem pelaporan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes. Sebaliknya, variabel pembayaran digital dan kejelasan sasaran anggaran terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci : Pembayaran Digital, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, BUMDes.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DIGITAL PAYMENTS, CLARITY OF BUDGET TARGETS, AND REPORTING SYSTEMS ON THE PERFORMANCE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

By

M RIZKY RICO SAPUTRA

This research was conducted to examine the impact of digital payment usage, budget target clarity, and the reporting system on the performance level of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Lampung Regency. The background of the problem originates from the fact that the performance achievement of BUMDes nationally, including in that region, remains suboptimal. The majority of BUMDes are still at the pioneer and beginner stages. The method applied in this study is quantitative with a survey strategy using a questionnaire instrument, which was distributed to 77 qualified BUMDes managers as the sample. Data processing was carried out using the Partial Least Square (PLS)-based Structural Equation Modeling (SEM) technique utilizing the SmartPLS 4.0 application. The research findings reveal that the reporting system exerts a positive and significant influence on BUMDes' performance. Conversely, the variables of digital payments and budget target clarity were proven to have no significant influence.

Keywords : Digital Payment, Budget Goal Clarity, Reporting System, BUMDes.

Judul Skripsi

: **PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA**

Nama Mahasiwa

: **M Rizky Rico Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2151031026**

Jurusan

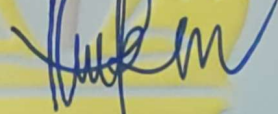
: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

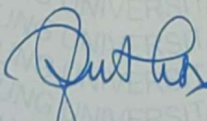
Komisi Pembimbing



Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 19870110 201404 2001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Akuntansi

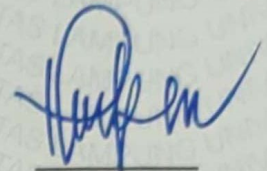


Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2001

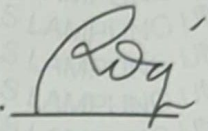
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

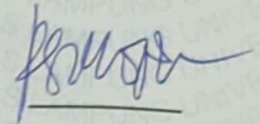
Ketua : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Kedua : **Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 November 2025

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Rizky Rico Saputra

NPM : 2151031026

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pengaruh Pembayaran Digital, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa” adalah benar hasil penulisan saya sendiri. Dalam penulisan skripsi ini juga terdapat penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang diambil dari sumber lain dan telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan unsur plagiarisme dalam skripsi ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 November 2025
Penulis



M Rizky Rico Saputra
2151031026

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama M Rizky Rico Saputra, lahir di Palembang pada tanggal 26 September 2002 sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara yang merupakan putra bungsu bapak Rendi Sudirman dan ibu Siswi Bintari. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Patra Mandiri 1 tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Patra Mandiri 1 tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Palembang tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi sebagai Anggota Bidang 2 Pengembangan Wawasan Keilmuan Mahasiswa. Penulis juga aktif dalam program kampus merdeka riset / penelitian dan mengikuti INCAF (*International Conference on Accounting and Finance*).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu
Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya tulis ini
Kepada

**Kedua Orang Tuaku tercinta,
Ayah Rendi Sudirman dan Ibu Siswi Bintari**

Terima kasih atas begitu banyak pengorbanan dalam menghantarkan ananda
menuntaskan sebagai kewajiban menuntut ilmu. Terima kasih atas untaian doa
dan kepercayaan kepada ananda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, semoga
dengan karya kecil ini bisa menjadi bukti kasih dan bakti ananda.

**Kakak-kakakku yang kebanggakan, Kak Mario Pramudya Utama dan Ayuk
Dwi Kurnia Putri Belina**

Terima kasih atas setiap dukungan dan motivasi yang selalu diberikan untukku.
Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah selama menempuh pendidikan
tinggi.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.

Q.S. Al-Baqarah: 286

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.

(HR. Ahmad)

“Setiap cobaan membentuk kita menjadi siapa kita seharusnya”.

Genichiro

SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah, yang kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan, serta ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejelekan amal perbuatan kita. Alhamdulillah Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan masukan yang menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang

telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.

8. Para staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa kedua orang tuaku, Ayah Rendi Sudirman dan Ibu Siswi Bintari, terima kasih untuk setiap doa yang menjadi nafasku, setiap pengorbanan yang tak terucapkan, dan cinta yang tak pernah berhenti menyinariku. Aku hanya ingin membuat kalian bangga, hari ini, dan seterusnya.
10. Kakak-kakakku, Kak Rio dan Ayuk Utie, terima kasih karena terus memberikan dukungan, motivasi, serta doa. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikan kalian.
11. Kepada Om Dika dan keluarga yang telah membantu saat penyebaran kuesioner.
12. Kepada para penghuni kost Pangestu yaitu, El Dimas, Mba Wika, Engkoh Ricardo, Rahmat Martabak, Adam El Pacul, Mas Umam, Abib Pringsewu, Bisma Wibu yang selalu meramaikan kost dan membantu dikala seminar proposal hingga ujian komprehensif.
13. Kepada diri saya sendiri yang penyabar, dan tekun sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 07 November 2025

Penulis

M Rizky Rico Saputra

2151031026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Agensi	13
2.2 Pembayaran Digital	15
2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran	17
2.4 Sistem Pelaporan	19
2.5 Kinerja BUMDes.....	22
2.5.1 Konsep Kinerja	22
2.5.2 Penilaian Kinerja.....	23
2.5.3 Indikator Kinerja Organisasi.....	24
2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	28
2.5.5 Badan Usaha Milik Desa	29
2.6 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7 Kerangka Pemikiran	34
2.8 Pengembangan Hipotesis	34
2.8.1 Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Kinerja BUMDes	34
2.8.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja BUMDes .	35
2.8.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja BUMDes	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Sumber Data	37
3.2 Populasi dan Sampel	37

3.2.1	Populasi.....	37
3.2.2	Sampel	37
3.3	Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	38
3.3.1	Kuesioner	38
3.3.2	Skala Pengukuran Variabel.....	38
3.4	Definisi Operasional Variabel	39
3.5	Metode Analisis Data	39
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.5.2	Analisis Data.....	40
3.5.3	Analisis Outer Model (Model Pengukuran).....	40
3.5.4	Analisis Inner Model (Model Struktural)	41
3.5.5	Uji Hipotesis	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Statistik Deskriptif.....	43
4.1.1	Deskripsi Profil Responden	43
4.1.2	Deskripsi Indikator	45
4.2	Analisa Data	48
4.2.1	Pengujian Model Pengukuran (Outer Model).....	48
4.2.2	Pengujian Struktur Model (Outer Model).....	55
4.2.3	Uji Hipotesis	57
4.3	Pembahasan	59
4.3.1	Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Kinerja BUMDes	59
4.3.2	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja BUMDes	60
4.3.3	Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja BUMDes	61
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan	62
5.3	Implikasi	63
5.4	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendapatan Pemerintah Daerah.....	4
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	32
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Gambar 4. 2 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	44
Gambar 4. 3 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	44
Gambar 4. 4 Hasil PLS-SEM.....	49
Gambar 4. 5 Hasil Uji Bootstrapping.....	58

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Presentase Aktivitas Perkembangan BUMDes	5
Table 1. 2 Data Klasifikasi Perkembangan BUMDes.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	38
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Pembayaran Digital.....	45
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran	46
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan.....	46
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja BUMDes	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Convergent Validity	49
Tabel 4. 6 Hasil AVE Uji Convergent Validity	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Discriminant Validity Melalui Cross-Loading.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Discriminant Validity Melalui HTMT	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.....	54
Tabel 4. 10 Hasil Uji R-square.....	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Effect Size (f^2)	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji Predictive Relevance (Q^2)	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Signifikansi (Path Coefficients)	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui lembaga khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup sekaligus kesejahteraan warga desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 ayat (1) dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi pengurangan angka kemiskinan, peningkatan standar hidup masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga pedesaan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui serangkaian strategi, seperti mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis lokal, pengembangan fasilitas dan infrastruktur desa, memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok penduduk, serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan. Seluruh langkah ini diharapkan mampu menciptakan transformasi holistik bagi kemajuan kehidupan masyarakat desa.

Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan kesanggupan desa sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. BUMDes diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 87 ayat (1) yaitu, desa dapat membentuk BUMDes, dengan jenis usaha yang dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 87 ayat (3) yaitu, BUMDes memiliki kewenangan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian maupun jasa publik, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan pendirian BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan untuk menampung berbagai aktivitas di sektor ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dijalankan oleh desa maupun melalui kerja sama antar desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong dan membangkitkan perekonomian di kawasan pedesaan dengan mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Kebijakan pembentukan BUMDes tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa BUMDes didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Sementara itu, pada ayat (2), dijelaskan bahwa BUMDes Bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih melalui musyawarah antar desa, dengan pendiriannya diputuskan dengan peraturan bersama kepala desa. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 10, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama harus mempertimbangkan sejumlah aspek krusial. Pertama, kebutuhan warga menjadi dasar utama dalam merancang inisiatif ini. Kedua, diperlukan kegiatan kolaboratif untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, analisis kelayakan usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan keberhasilan operasional. Keempat, desain model bisnis harus mencakup aspek tata kelola, struktur organisasi, ragam usaha, serta integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, orientasi pembentukan harus sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, serta perlindungan nilai-nilai keagamaan, tradisi adat, norma sosial, dan kearifan lokal.

Proses pendirian BUMDes ini wajib melibatkan sinergi multipihak, termasuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kemasyarakatan desa, serta peran aktif tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di tingkat lokal. Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan

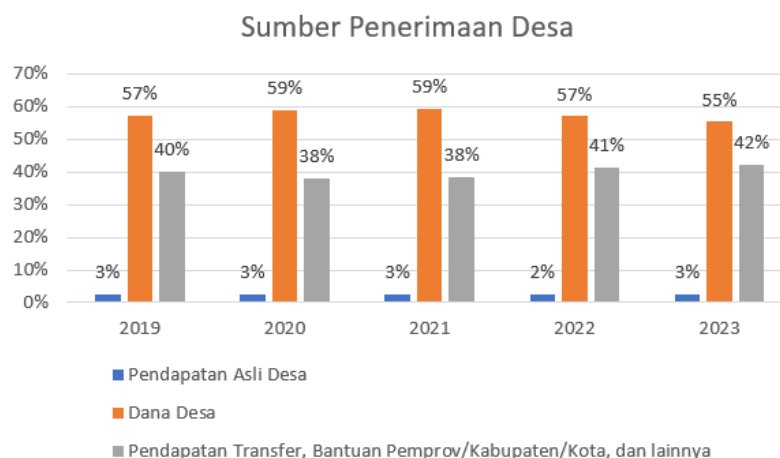
keselarasan program dengan kondisi riil dan aspirasi masyarakat setempat.

Adapun tujuan pendirian BUMDes sebagaimana tercantum dalam PP No. 11 Tahun 2021 pada pasal 3 yaitu, tujuan pendirian BUMDes/BUMDes Bersama adalah: a) Mengembangkan aktivitas perekonomian melalui pengelolaan usaha, perluasan investasi, dan peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal desa, b) Menyediakan layanan publik dengan menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, termasuk pengelolaan lumbung pangan desa, c) Meningkatkan penerimaan desa melalui keuntungan usaha serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat desa, d) Memberdayakan aset desa guna menciptakan nilai ekonomi lebih tinggi melalui pengelolaan yang efektif, dan e) Memperkuat ekosistem ekonomi digital di desa dengan mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi digital.

Saat ini terdapat 55.787 unit BUMDes dan 5.990 unit BUMDes Bersama dan total keseluruhan secara Nasional adalah 61.777 unit (Kemendesa PDTT, 2024). Sebagai suatu entitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat, BUMDes diharapkan mampu menjadi solusi sebagai pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam praktiknya, kinerja BUMDes menjadi indikator utama keberhasilan fungsi ini, mencakup aspek keuangan, operasional, dan dampak sosial.

Namun demikian, BUMDes yang ada saat ini cenderung berkinerja buruk sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi desa masih belum signifikan (Nugroho, 2020). Menurut Ali dkk. (2019), beberapa kendala yang menghambat optimalisasi BUMDes meliputi keterbatasan permodalan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan, serta minimnya keterlibatan dan dukungan dari sektor swasta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes, terutama dalam aspek tata kelola keuangan, adopsi teknologi, dan akuntabilitas anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemampuan

desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat minim sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini:



Gambar 1. 1 Pendapatan Pemerintah Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2020-2024)

Kabupaten Lampung Selatan terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, yang menjadi salah satu gerbang utama dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Bakauheni. Lampung Selatan memiliki luas wilayah sekitar 2.109,74 km² dan terdiri atas 17 kecamatan dengan ratusan desa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dengan lokasi strategis yang dilalui jalur perdagangan dan transportasi utama, Lampung Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kabupaten Lampung Selatan tercatat menempati posisi kedua sebagai daerah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbanyak di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di wilayah ini mencapai 256 unit, hanya berada di bawah Kabupaten Lampung Tengah yang memegang peringkat pertama. Hingga kini, kegiatan operasional BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan masih berjalan aktif seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Table 1. 1 Data Presentase Aktivitas Perkembangan BUMDes
Kabupaten Lampung Selatan**

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Presentase Jumlah BUMDes			
			Aktif	%	Tidak Aktif	%
1	Natar	26	15	57,69	11	42,31
2	Tanjung Bintang	16	12	75	4	25
3	Kalianda	25	10	40	15	60
4	Sidomulyo	16	13	81,25	3	18,75
5	Katibung	12	9	75	3	25
6	Penengahan	22	13	59,09	9	40,91
7	Palas	21	19	90,48	2	9,52
8	Jati Agung	21	16	76,20	5	23,80
9	Ketapang	17	13	76,47	4	23,53
10	Sragi	10	10	100	0	0
11	Raja Basa	16	7	43,75	9	56,25
12	Candipuro	14	14	100	0	0
13	Merbau Mataram	15	13	86,67	2	13,33
14	Bakauheni	5	4	80	1	20
15	Tanjung Sari	8	5	62,5	3	37,5
16	Way Sulan	8	8	100	0	0
17	Way Panji	4	1	25	3	75
Total		256	182	67	74	33

Sumber: sid.kemendesa.go.id (2023)

Dari Tabel 1.1, sebagian besar BUMDes di beberapa kecamatan terindikasi tidak aktif. Secara umum, jumlah BUMDes yang aktif mencapai sekitar 67%, sedangkan sebanyak 33% masih belum aktif. Dari data tersebut, hampir semua kecamatan memiliki BUMDes yang tidak aktif, kecuali tiga kecamatan, yaitu Candipuro, Sragi, dan Way Sulan.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perkembangan BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan

tidak hanya dapat dilihat dari tingkat keaktifan BUMDes, tetapi juga dari klasifikasi perkembangannya. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi empat kategori, yaitu Perintis, Pemula, Berkembang, dan Maju, seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1.2 berikut ini:

**Table 1. 2 Data Klasifikasi Perkembangan BUMDes
Kabupaten Lampung Selatan**

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Klasifikasi BUMDes			
			Perintis	Pemula	Berkembang	Maju
1	Natar	26	4	0	21	1
2	Tanjung Bintang	16	2	0	13	1
3	Kalianda	25	21	2	2	0
4	Sidomulyo	16	9	0	7	0
5	Katibung	12	9	3	0	0
6	Penengahan	22	16	3	3	0
7	Palas	21	13	3	4	1
8	Jati Agung	21	0	1	18	2
9	Ketapang	17	2	0	15	0
10	Sragi	10	1	0	8	1
11	Raja Basa	16	15	1	0	0
12	Candipuro	14	10	3	0	1
13	Merbau Mataram	15	4	1	10	0
14	Bakauheni	5	2	2	1	0
15	Tanjung Sari	8	2	3	2	1
16	Way Sulan	8	2	0	4	2
17	Way Panji	4	3	1	0	0
Total		256	115	23	108	10

Sumber: sid.kemendesa.go.id (2023)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, terdapat 10 BUMDes yang masuk pada kategori maju, pada kategori berkembang terdapat 108 BUMDes, pada kategori pemula terdapat 23 BUMDes, dan pada kategori perintis terdapat 115 BUMDes. Sebagian BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan belum

menunjukkan kinerja usaha yang baik terutama dalam keberhasilan mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi yang merupakan sumber potensi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha BUMDes, hal ini nampak pada masih terdapat 138 BUMDes yang masih pada klasifikasi perintis dan klasifikasi pemula. Dari segi efektivitas tujuan pendirian BUMDes sebagian belum memberikan gambaran capaian terutama yang berkaitan dengan misi dari BUMDes yang berfungsi sebagai agen pembangunan perekonomian di desa. Sebagian belum mampu mewujudkan memenuhi tujuan pendirian BUMDes itu sendiri.

Agar BUMDes yang telah dibentuk dapat berkembang dan mencapai tujuan sebagaimana tertuang pada pasal 3 PP No. 11 Tahun 2021, pengelolaan BUMDes perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kinerja BUMDes, dilakukanlah transformasi digital melalui berbagai inisiatif cerdas, seperti BRILink, Agen46, dan E-Samdes, guna memperluas jangkauan transaksi nontunai hingga ke pelosok desa.

Perkembangan zaman modern yang didorong oleh kemajuan teknologi telah menciptakan transformasi signifikan di berbagai bidang, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu terobosan terpenting dalam industri ini adalah kemunculan sistem pembayaran digital. Inovasi ini dianggap revolusioner disebabkan oleh berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti kepraktisan, jangkauan luas, dan efektivitas dalam bertransaksi (Chen & Ren, 2022). Hadirnya pembayaran digital memberikan pengaruh menguntungkan pada layanan, produk, dan model bisnis inovatif, sekaligus berkontribusi pada kestabilan moneter dalam infrastruktur pembayaran (Bank Indonesia, 2020).

Sebagai salah satu pilar utama stabilitas moneter, sistem pembayaran telah mengalami evolusi. Dari yang sebelumnya sepenuhnya mengandalkan uang tunai, kini beralih menuju sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien, yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*e-money*). Salah satu pendorong utama perkembangan ini adalah semakin meluasnya penggunaan

smartphone, yang memungkinkan konsumen membayar barang dan jasa dengan mudah melalui perangkat seluler. Saat ini, metode pembayaran digital telah menjadi pilihan favorit banyak orang. Hal ini tidak terlepas dari daya tariknya yang menawarkan kemudahan berbelanja sekaligus membayar melalui perangkat *mobile*. Transaksi keuangan berbasis seluler memberikan sejumlah keunggulan, seperti fleksibilitas, kemudahan, dan kenyamanan dalam proses pembayaran.

Penerapan sistem pembayaran digital dalam pengelolaan BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja operasional. Integrasi layanan keuangan digital ke dalam kegiatan usaha memberikan manfaat berupa penciptaan nilai tambah, peningkatan efisiensi operasional, serta keuntungan finansial yang berkontribusi pada kinerja yang lebih optimal (Ledi et al., 2023). Layanan keuangan digital juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengurangi biaya transaksi, seperti transfer uang, pembayaran tagihan utilitas, serta koordinasi dengan pemasok dan pelanggan (Ledi et al., 2023), sehingga dana yang tersedia untuk operasional bisnis dapat dimanfaatkan secara lebih efektif (Konte and Tetteh, 2023). Selain itu, masyarakat juga diuntungkan dengan kemudahan dalam melakukan transaksi melalui pembayaran digital, seperti *e-wallet*, transfer bank, atau kode QR, yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga mendorong partisipasi lebih luas.

Meskipun adopsi pembayaran digital di wilayah pedesaan masih tergolong terbatas, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi layanan keuangan desa. Salah satu langkah nyata adalah bekerja sama dengan Bank Lampung melalui aplikasi Lampung Smart, yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, berbagai inisiatif lain seperti BRILink, Agen46, dan E-Samdes juga dihadirkan untuk memperluas jangkauan layanan. Upaya ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membuka akses transaksi nontunai hingga ke pelosok desa, sehingga masyarakat pedesaan tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi digital.

Pembayaran digital juga menghadirkan transparansi yang lebih baik dengan catatan transaksi yang terdokumentasi secara otomatis, yang mampu membangun kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, penerapan ini membuka peluang pengembangan bisnis, seperti memperluas jangkauan pemasaran produk desa hingga ke luar wilayah. Dengan kemudahan pembayaran, frekuensi transaksi dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan BUMDes. Selain itu, sistem ini juga mendorong inklusi keuangan di desa dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

Dalam pengelolaan organisasi, kejelasan sasaran anggaran memegang peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan. Menurut Harianto dkk. (2021), kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik, dengan tujuan agar dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab mencapai sasaran tersebut. Anggaran yang tidak direncanakan secara efektif dan tidak berfokus pada pencapaian kinerja akan berpotensi untuk merusak rencana yang telah dirancang sebelumnya.

Kunci keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh seberapa efektif dan bijak organisasi tersebut dalam mengelola anggarannya. Dengan perencanaan anggaran yang terdefinisi dengan baik, lembaga mampu meningkatkan akuntabilitas atas pencapaian atau ketidakberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab, serta memfasilitasi setiap anggota dalam merancang tujuan keuangan yang lebih terukur. Kondisi ini turut mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut.

Sistem pelaporan merupakan komponen penting dalam pengelolaan organisasi. Sistem ini, yang juga dikenal sebagai akuntansi pertanggungjawaban, berfungsi untuk mengukur kinerja dengan cara mengevaluasi setiap unit pertanggungjawaban kemudian membandingkannya dengan capaian yang ditargetkan atau telah dianggarkan (Zakiyudin dan Suyanto, 2015). Melalui mekanisme ini, informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat disampaikan secara jelas dan tepat

waktu kepada pihak yang berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan dan data lainnya agar dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan strategis keputusan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Keberadaan sistem pelaporan yang efisien mampu meningkatkan kinerja organisasi, karena informasi yang diberikan membuka peluang untuk evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Pelaporan yang akurat dan sesuai sasaran menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus mendukung pengawasan proses operasional secara transparan dan terukur.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh pembayaran digital, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap kinerja BUMDes. Temuan-temuan ini memberikan beragam perspektif mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pada penelitian oleh Rani dan Desiyanti (2024) dan Asisa dkk. (2022), yang membuktikan bahwa pembayaran digital berdampak positif pada kinerja UMKM. Hal ini memperkuat argumen yang menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran dapat menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

Adapun mengenai kejelasan sasaran anggaran, sejumlah kajian ilmiah telah dilakukan. Penelitian oleh Qotrunnada dkk. (2018), membuktikan adanya hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran yang terukur dengan efektivitas kinerja manajerial. Sedangkan penelitian oleh Astuti dan Mulya (2019), berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial.

Lebih lanjut, sistem pelaporan yang baik turut berperan penting dalam mendukung capaian organisasi. Seperti diungkapkan dalam riset Harianto dkk. (2021), mekanisme pelaporan yang komprehensif mampu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja institusi publik. Hal ini semakin diperkuat oleh Gustina dan Febriyanti (2020), yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pembayaran Digital, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja BUMDes”** dengan Kabupaten Lampung Selatan sebagai objek penelitian karena berdasarkan kajian literatur sebelumnya, belum banyak penelitian yang secara khusus menguji pengaruh kolektif dari variabel pembayaran digital, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun beberapa studi telah membahas pengaruh masing-masing variabel ini pada konteks organisasi lain, penelitian yang berfokus pada konteks BUMDes belum ditemukan. Oleh sebab itu, kajian ini diharapkan mampu menyumbangkan bukti berbasis data dalam menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor tersebut terhadap capaian kinerja BUMDes, sekaligus dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan BUMDes ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.2.1** Apakah pembayaran digital berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan?
- 1.2.2** Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan?
- 1.2.3** Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1** Mengidentifikasi pengaruh pembayaran digital terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.2 Mengevaluasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.3 Menilai pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait teori serta konsep akademis yang dipelajari di bangku kuliah, perlu dilakukan analisis perbandingan dengan praktik nyata di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam merumuskan strategi penyelesaian masalah dan upaya mengatasi hambatan guna meningkatkan kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) secara optimal. Dengan demikian, integrasi antara landasan teoritis dan implementasi praktis dapat menjadi dasar pengembangan solusi yang efektif dalam konteks pengelolaan lembaga tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pengelola BUMDes, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja melalui optimalisasi penerapan teknologi digital, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan yang efektif, sementara bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan salah satu teori utama dalam ilmu ekonomi dan manajemen yang mengkaji hubungan antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajer/pengelola). Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, dalam artikel seminar, "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*". Mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu bentuk perjanjian di mana prinsipal melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori agensi berkembang akibat adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dengan pihak agen (para manajer) dalam struktur organisasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pemisahan kepemilikan dari kontrol, preferensi risiko, durasi keterlibatan, penghasilan yang terbatas, pengambilan keputusan, kesenjangan informasi, *moral hazard*, dan retensi pendapatan (Panda and Leepsa, 2017).

Menurut Bendickson et al. (2016), agen cenderung bertindak mengutamakan kepentingan prinsipal ketika tindakan mereka berbasis pada hasil. Namun, jika terdapat persepsi ketidakadilan, agen dapat beralih ke perilaku yang bersifat egois. Perilaku tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi, khususnya ketika prinsipal tidak mampu memantau kinerja agen secara efektif. Dalam kondisi ini, agen memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang cenderung menguntungkan kepentingan pribadi (Hussain et

al., 2018).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam "*Agency Theory: An Assessment and Review*" terdapat tiga asumsi dasar teori keagenan:

1. Seseorang pada dasarnya lebih mementingkan dirinya sendiri.
2. Seseorang yang daya pikirnya terbatas dalam memahami persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Seseorang yang selalu menghindari risiko.

Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan, pihak prinsipal perlu menanggung biaya keagenan melalui mekanisme pemantauan dan pemberian stimulus guna menjamin keselarasan tindakan agen dengan tujuan utama pemilik. Biaya ini meliputi langkah mitigasi risiko, proses pengendalian operasional, serta kerugian sisa yang bersifat inheren dalam hubungan keagenan (Panda and Leepsa, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, teori ini mengkaji kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan antara prinsipal (pemerintah desa dan masyarakat) dengan agen (pengelola BUMDes) yang bersumber dari ketimpangan informasi dan perbedaan orientasi kepentingan. Implementasi pembayaran digital berfungsi menekan gap informasi serta memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang melalui penguatan akuntabilitas pengelolaan aset.

Penetapan prioritas anggaran yang terukur menciptakan keselarasan tujuan antara kedua pihak, sehingga meminimalisir kecenderungan penyimpangan dalam manajemen alokasi dana. Di sisi lain, mekanisme pelaporan berkala yang komprehensif berperan sebagai alat monitoring untuk menjamin kesesuaian tindakan agen dengan kebijakan prinsipal. Melalui optimalisasi ketiga aspek tersebut, biaya keagenan seperti pengeluaran operasional pengawasan dan potensi inefisiensi dana dapat ditekan, sehingga mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan BUMDes.

2.2 Pembayaran Digital

Pembayaran digital (*Digital Payment*) merupakan salah satu inovasi baru dalam sistem keuangan global seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan penetrasi internet. Menurut Rani dan Desiyanti (2024), pembayaran digital adalah sebuah metode pembayaran nontunai yang dijalankan secara daring. Metode ini mewajibkan penggunanya untuk memanfaatkan perangkat lunak jaringan dan akun virtual guna mengonversi uang fisik, sehingga transaksi dapat dilakukan melalui beragam pilihan perangkat komunikasi dan sistem pembayaran elektronik. Transaksi ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel tanpa terikat oleh batasan waktu dan tempat, sehingga sering dikenal dengan istilah dompet digital atau uang elektronik.

Menurut Chen and Ren (2022), pembayaran digital adalah bentuk transaksi yang terjadi melalui alat dan instrumen digital seperti pembayaran seluler, dompet seluler, mata uang kripto, dan pembayaran elektronik yang telah mengubah sistem keuangan dengan menyempurnakannya menggunakan teknologi telepon seluler dan mendesain ulang prosedur pembayaran. Penggunaan pembayaran digital tidak hanya membuat pembayaran lebih aman, lebih praktis, lebih mudah, tetapi juga membuat transfer nilai antar akun lebih efisien dalam hal transaksi (Sinaga et al., 2023). Sistem pembayaran digital merupakan solusi bagi pedagang untuk memberikan pilihan pembayaran secara online melalui internet bagi konsumennya.

Menurut Rani dan Desiyanti (2024), terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran digital, di antaranya:

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan indikator yang menunjukkan keyakinan individu terhadap tingkat kepraktisan suatu teknologi, termasuk aspek keterpahaman dan efisiensi dalam pengoperasiannya (Tyas dan Darma, 2017). Lebih lanjut, konsep ini merepresentasikan kemampuan teknologi dalam menyajikan

pengalaman yang sederhana bagi pengguna selama aktivitas (Li, 2016).

2. Persepsi Manfaat

Persepsi manfaat mengacu pada manfaat yang dirasakan konsumen saat melakukan transaksi secara digital, yang dapat mendorong minat mereka untuk melakukan transaksi kembali (Saraswati dan Rahyuda, 2021). Adapun kemanfaatan yang dirasakan termasuk menawarkan fleksibilitas, efisiensi waktu, kenyamanan dalam bertransaksi, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan standar yang diharapkan pengguna (Keng Soon et al., 2019). Begitu pula Sholihah dan Nurhapsari (2023), mengemukakan bahwa persepsi kemanfaatan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi mampu meningkatkan kinerja atau memudahkan aktivitas.

3. Persepsi Kredibilitas

Persepsi Kredibilitas didefinisikan sebagai elemen kunci dalam membangun kepercayaan dalam transaksi keuangan, di mana salah satu pihak meyakini bahwa mitranya memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan tugas secara kompeten dan konsisten (Yadav et al., 2025). Lebih lanjut, Reza dan Sri (2017), menjelaskan bahwa konsep ini juga mencerminkan perilaku individu yang meyakini keamanan transaksi serta kerahasiaan data pribadi mereka, keyakinan ini kemudian menjadi faktor penentu dalam adopsi sistem teknologi tertentu.

4. Pengaruh Sosial

Pengaruh sosial merupakan derajat keyakinan seseorang bahwa kelompok sosial terdekat termasuk keluarga, teman, atau pihak yang dijadikan acuan memiliki ekspektasi agar ia menerima dan memanfaatkan suatu teknologi (Moti and Walia, 2020). Konsep ini diperkuat oleh Yadav dkk. (2025) yang menyatakan bahwa fenomena tersebut mencerminkan tingkat penerimaan individu terhadap produk atau layanan berbasis teknologi, dipengaruhi oleh persepsi akan

norma atau tekanan sosial di sekitarnya. Dengan kata lain, keputusan seseorang untuk menggunakan teknologi tidak hanya bergantung pada manfaat objektif, tetapi juga pada bagaimana lingkungan sosial memandang pentingnya adopsi teknologi tersebut.

5. Niat Perilaku

Niat perilaku didefinisikan sebagai tingkat keinginan atau dorongan seseorang untuk merealisasikan suatu tindakan tertentu (Estuningrum dan Dharma, 2022). Selaras dengan pandangan tersebut, Reza dan Sri (2017), menyatakan bahwa sikap yang mendukung penerapan teknologi informasi terbaru akan memperkuat niat perilaku dalam mengimplementasikan teknologi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pembayaran digital oleh BUMDes berpotensi meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Transaksi digital dapat memangkas waktu proses pembayaran, mengurangi risiko kesalahan administratif, dan mengoptimalkan efisiensi operasional, sehingga BUMDes mampu melayani masyarakat dengan lebih produktif. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui pencatatan transaksi yang tercatat langsung dalam *database*, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dana serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembayaran digital tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga mendukung perkembangan ekosistem ekonomi berbasis teknologi yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat modern.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan upaya untuk membagi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi berbagai kebutuhan yang cenderung tidak terbatas, sebuah situasi yang mencerminkan kelangkaan sumber daya (Majid, 2019). Menurut Bahri (2021), anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai

dengan visi dan misi organisasi. Kedua, untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Ketiga, untuk mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Keempat, untuk menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Dengan demikian, anggaran menjadi pedoman yang komprehensif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuannya.

Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada seberapa spesifik dan jelas suatu target ditetapkan, sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat memahaminya dengan mudah untuk dicapai (Arta dan Rasmini, 2019). Sasaran anggaran yang terdefinisi dengan baik berfungsi sebagai panduan operasional bagi BUMDes dalam menetapkan prioritas program dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Tanpa kejelasan sasaran anggaran, BUMDes rentan terhadap pemborosan sumber daya dan ketidakselarasan program dengan kebutuhan prioritas desa.

Menurut Astuti dan Mulya (2019), kejelasan tujuan anggaran mengacu pada tingkat ketegasan dan kerincian dalam perumusan target anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh pihak yang terkait, khususnya individu atau unit kerja yang memikul tanggung jawab operasional, mampu memahami secara komprehensif arahan dan kriteria yang harus dicapai melalui alokasi anggaran tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya formulasi indikator yang terukur dan tidak ambigu sebagai landasan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja BUMDes semakin terlihat ketika tujuan yang terdefinisi baik mampu mengarahkan alokasi sumber daya secara strategis. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan BUMDes mengalokasikan sumber daya secara optimal, memantau progres objektif, serta menciptakan akuntabilitas. Selain itu, sasaran yang realistis meningkatkan motivasi tim, sementara kesesuaian dengan visi desa (misalnya pemberdayaan ekonomi lokal) memperkuat relevansi program bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika suatu tujuan tidak jelas dan tidak tepat, maka

sulit untuk mengetahui dan mencapainya.

Menurut Sari dkk. (2020), terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran, di antaranya:

1. Jelas

Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda (Sari dkk., 2020). Menurut Qotrunnada dkk. (2018), menyatakan bahwa ketika anggaran disusun dengan jelas mampu mendorong peningkatan kepuasan kerja, mengurangi ketegangan dalam pelaksanaan tugas, memperbaiki sikap karyawan terhadap anggaran, serta meningkatkan kinerja penganggaran dan efisiensi biaya secara signifikan bagi pelaksana anggaran.

2. Spesifik

Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi bermacam-macam (Sari dkk., 2020). Menurut Arta dan Rasmini (2019), bahwa anggaran yang ditentukan secara spesifik akan memudahkan pemahaman pihak penanggung jawab dalam mencapai target anggaran.

3. Mengerti

Mengerti, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama (Sari dkk., 2020). Ketika sasaran anggaran mudah dimengerti hal tersebut akan mendorong karyawan untuk dapat melakukan yang terbaik (Astuti dan Mulya, 2019).

2.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan keuangan yang disusun guna menyajikan informasi relevan terkait posisi keuangan dan seluruh transaksi

yang dilakukan suatu entitas pelaporan dalam satu periode tertentu (Sari dkk., 2020). Setiap entitas memiliki kewajiban untuk menyusun laporan yang sistematis dan terstruktur guna mendeskripsikan upaya serta hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut diperlukan untuk mendukung akuntabilitas, pengelolaan manajemen, transparansi, prinsip berkelanjutan antargenerasi, serta penilaian kinerja.

Di Indonesia, landasan konseptual pelaporan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), khususnya PSAK 1. Standar ini menegaskan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara terstruktur untuk memberikan informasi yang bermanfaat tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas bagi para pengambil keputusan ekonomi.

Dalam konteks BUMDes, kewajiban pelaporan ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, yang dimaksud dengan Sistem Pelaporan adalah keseluruhan mekanisme yang digunakan BUMDes untuk menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Komponen laporan mencakup neraca, laporan penghasilan dan pengeluaran, laporan perubahan modal, laporan aliran kas, serta keterangan tambahan yang menjelaskan laporan keuangan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada BUMDes dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan.

Secara ideal, laporan keuangan dirancang untuk menyediakan data yang mendukung proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Ali Zakiyudin dan Suyanto, 2015). Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi alat transparansi, tetapi juga sarana peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui analisis kinerja yang komprehensif.

Menurut Rininda dan Sudaryati (2020), terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sistem pelaporan, di antaranya:

1. Tepat Waktu

Tepat waktu merujuk pada penyampaian informasi sedini mungkin agar dapat menjadi landasan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi serta mencegah penundaan dalam proses tersebut (Sanjaya dan Wirawati, 2016). Menurut pandangan lain, Pangestuti dkk. (2020) mendefinisikan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan kondisi di mana laporan keuangan yang telah diaudit diserahkan sesuai dengan tenggat yang ditetapkan, sehingga relevansi dan manfaat informasinya tetap terjaga. Kedua perspektif ini menegaskan bahwa kesiapan penyajian data tidak hanya berkaitan dengan ketepatan jadwal, tetapi juga memastikan nilai utilitas informasi bagi pengambilan kebijakan strategis.

2. Objektivitas

Objektivitas mengacu pada upaya menghindari bias pribadi, benturan kepentingan, atau ketergantungan berlebihan pada pengaruh eksternal yang berpotensi merusak kualitas keputusan yang diambil (IAPI, 2021). Menurut Furiady dan Kurnia (2015), objektivitas merupakan sikap seseorang yang tidak terpengaruh oleh pandangan subjektif pihak lain yang berkepentingan, menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang ada.

3. Relevan

Relevan merujuk pada kemampuan informasi keuangan dalam memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh pengguna (IASB, 2018). Menurut, Puspitosari dkk. (2019), menjelaskan bahwa relevansi mencerminkan kualitas informasi yang mampu mendukung para pengguna dalam menganalisis dan memilih alternatif terbaik ketika dihadapkan pada berbagai opsi keputusan.

4. Konsisten

Konsisten mengacu pada penggunaan metode yang sama untuk item

yang sama, baik dari periode ke periode dalam entitas pelaporan atau dalam satu periode di seluruh entitas (IASB, 2018). Menurut Harahap (2017), konsisten merupakan penggunaan metode yang digunakan sebagaimana yang disepakati diawal harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu.

5. Akurat

Akurat merupakan seberapa akurat data yang dilaporkan terhadap data yang sebenarnya (Listyorini, 2018). Menurut (Damanik dan Purwaningsih, 2017), akurat mengacu pada sejauh mana informasi yang disediakan adalah informasi yang benar, penyajian fakta yang jujur, bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan.

6. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi mengacu pada tingkat kemudahan yang dimiliki individu dalam mengakses atau mendapatkan informasi tertentu, sebagaimana dinyatakan oleh (Paramayana dkk., 2022). Menurut pandangan lain, Aprilia (2019) mendefinisikan konsep ini sebagai kemampuan suatu entitas dalam menyediakan aksesibilitas bagi pemangku kepentingan untuk memahami atau memperoleh laporan keuangan, sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi aktif stakeholder.

2.5 Kinerja BUMDes

2.5.1 Konsep Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang telah diraih dalam menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang telah diperintahkan dalam suatu periode tertentu (Goldwin dkk., 2019). Menurut Rachman (2021), kinerja dapat diartikan sebagai serangkaian tujuan atau tanggung jawab yang ditugaskan kepada individu untuk diselesaikan secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara terbatas, termasuk batasan waktu yang melekat padanya. Dalam konsep kinerja (*performance*) terdapat hubungan dengan

beberapa pemahaman antara lain pengertian kinerja, indikator kinerja (*performance indicator*), dan penilaian kinerja (*performance appraisal*). Terkait hal tersebut berbagai literatur telah membahas konsep kinerja dan menghasilkan pengertian yang bervariasi, namun pada intinya, makna yang dihasilkan tetap sama, yaitu hasil atau pencapaian dari suatu proses usaha.

Berdasarkan kajian para pakar, kinerja dipahami sebagai aspek penting yang perlu dipantau dan dilaporkan kepada stakeholders terkait. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai efektivitas pencapaian target operasional lembaga dalam kurun waktu spesifik. Dalam konteks BUMDes, kinerja organisasi mencerminkan capaian usaha ekonomi beserta peran aktifnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kontribusi terhadap pendapatan desa melalui PADes. Implementasi evaluasi kinerja secara berkala menjadi dasar untuk mengoptimalkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan strategis.

2.5.2 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja atau *performance appraisal* adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh atasan untuk menilai kinerja pekerjaan bawahan mereka berdasarkan hasil yang telah dicapai (Cappelli and Conyon, 2018). Menurut Denisi and Murphy (2017), penilaian kinerja merupakan prosedur formal yang tidak terlalu sering dilakukan, di mana beberapa penilai (umumnya atasan langsung) melakukan evaluasi terhadap pekerja berdasarkan sejumlah aspek tertentu, memberikan nilai kuantitatif, serta menginformasikan hasil akhir kepada karyawan bersangkutan. Secara ideal, mekanisme ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman karyawan terhadap peran dan tanggung jawabnya, mengidentifikasi peluang pengambilan risiko yang konstruktif, serta mengenali kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya dalam menjalankan berbagai tugas terkait posisinya (Triyani et al., 2023).

Hasil dari proses penilaian kinerja akan menjadi dasar untuk menentukan berbagai keputusan terkait karyawan, seperti penyesuaian gaji yang dikenal sebagai sistem pembayaran berbasis prestasi, pemberian bonus dan kompensasi tambahan, peluang promosi, serta tindakan disipliner, termasuk

penurunan jabatan hingga pemutusan hubungan kerja. Di lain pihak, pelaksanaan evaluasi kinerja secara optimal dan berintegritas mampu memperkuat komitmen serta dorongan kerja para pegawai, sehingga target perusahaan dapat terwujud sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan individu maupun kelompok dalam mencapai misinya. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kerja, menempatkan sumber daya secara strategis, serta memotivasi karyawan. Selain itu, penilaian ini juga berguna sebagai dasar dalam menentukan kebijakan organisasi ke depan. Penilaian kinerja berfungsi tidak hanya untuk mendukung peningkatan dan keberlanjutan usaha, tetapi juga sebagai langkah untuk menilai kemampuan karyawan dalam rangka memberikan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

2.5.3 Indikator Kinerja Organisasi Publik

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai penilaian kinerja. Untuk melaksanakan penilaian kinerja, diperlukan indikator-indikator yang dapat mengukur secara jelas sejauh mana kinerja individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator diperlukan sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan penilaian kinerja. Indikator kinerja memiliki peran penting dalam pengelolaan kinerja di semua tingkat organisasi, baik secara strategis maupun operasional atau teknis.

Menurut Afrizal (2018), terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi, di antaranya:

1. Produktivitas

Produktivitas didefinisikan sebagai tingkat efisiensi dan efektivitas yang dicapai oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Afrizal, 2018). Pendapat ini diperkuat oleh Asmawati dkk. (2018) yang menyatakan bahwa produktivitas juga mencerminkan sejauh mana hasil pelayanan publik sesuai dengan

harapan, menjadikannya salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja. Secara umum, konsep ini dipahami sebagai perbandingan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang diperoleh (*output*). Kedua perspektif ini saling melengkapi, menegaskan bahwa produktivitas tidak hanya terkait dengan pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan optimalisasi proses untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan pengukuran kinerja yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas aktivitas yang dijalankan, serta tingkat kepuasan masyarakat selaku penerima layanan (Afrizal, 2018). Menurut Putri dkk. (2021), konsep ini juga mencakup serangkaian aktivitas yang bersifat fisik maupun nonfisik dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat menjadi parameter penting karena dapat diakses melalui media massa atau forum diskusi publik. Kemudahan memperoleh informasi ini menjadikannya alat ukur kinerja yang praktis dan ekonomis bagi organisasi publik. Dengan kata lain, kualitas layanan mencerminkan sejauh mana birokrasi mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauhmana pegawai layanan mempunyai daya tanggap, mengenali kebutuhan, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan program (Samsuddin, 2016). Senada dengan hal tersebut, Asmawati dkk. (2018) mempertegas bahwa responsivitas mencakup kapasitas pengelola organisasi dalam memahami keinginan masyarakat, menyusun skala prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan berbasis kebutuhan dan aspirasi warga setempat. Secara esensial, konsep ini menekankan kesesuaian antara program/kegiatan pelayanan dengan kebutuhan riil masyarakat. Rendahnya responsivitas tercermin dari adanya kesenjangan antara

layanan yang disediakan institusi dengan harapan publik, yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Ariany dan Putera, 2013). Sementara itu, Ansell & Torfing (2015), mendefinisikan responsibilitas sebagai proses untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam organisasi publik sejalan dengan tujuan bersama serta norma-norma kelembagaan yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif (Ali Zakiyudin dan Suyanto, 2015). Sementara itu, Rizky dan Islahuddin (2023), mendefinisikan akuntabilitas sebagai alat yang sangat mendasar dari tata kelola organisasi, dengan empat poin penting, yaitu menugaskan tanggung jawab, melakukan pengukuran kinerja, menilai kinerja, dan akhirnya memberikan penghargaan yang ditentukan oleh berbagai faktor.

Menurut Kumorotomo (1996), terdapat beberapa kriteria utama yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah berorientasi profit, yaitu:

1. Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*), yang dihubungkan dengan tolok ukur kinerja atau target yang telah ditetapkan sebelumnya (Majid, 2019). Sementara itu, Daft (2021), menjelaskan bahwa efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dengan

demikian, efisiensi menjadi fondasi kritis dalam menilai sejauh mana organisasi mampu meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai dari setiap aset yang dimiliki.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017). Sementara itu, Mahmudi (2015), menegaskan bahwa efektivitas mencerminkan interkoneksi antara hasil yang dicapai (*output*) dengan target yang direncanakan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

3. Keadilan

Keadilan merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tidak bersifat non-diskriminatif (Widanti, 2022). Prinsip ini menuntut kesetaraan perlakuan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status atau latar belakang, di mana setiap pengguna layanan berhak mendapatkan standar pelayanan yang sama. Lebih lanjut, Albari (2014), memperluas pemahaman ini dengan menegaskan bahwa keadilan juga berarti pemenuhan hak masyarakat secara utuh dalam segala aspek kehidupan, tanpa adanya pembatasan atau syarat yang bersifat diskriminatif atau tidak rasional. BUMDes harus memastikan semua masyarakat mendapat akses yang setara, sesuai haknya, tanpa intervensi yang tidak objektif.

4. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan strategi organisasi dalam menyediakan layanan yang mengutamakan ketepatan waktu, kecepatan respons, serta kejelasan informasi kepada pelanggan (Egim et al., 2023). Sebagai wujud komitmen organisasi, konsep ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara efisien, tetapi juga menjamin transparansi komunikasi untuk meminimalkan kesalahpahaman. Menurut Sinollah dan Masruroh (2019), esensi daya tanggap terletak

pada konsistensi organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat waktu, baik melalui prosedur layanan yang terstruktur maupun adaptasi terhadap dinamika permintaan. Implementasi prinsip ini secara holistik mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus membangun citra institusi yang andal dan responsif di mata publik.

Berbagai ahli memiliki perspektif berbeda dalam menetapkan dimensi dan indikator pengukuran kinerja, baik terkait kriteria, ruang lingkup, maupun parameter penilaian. Berdasarkan analisis konseptual tentang kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengadopsi teori kinerja dari Kumorotomo (1996) sebagai landasan utama. Pemilihan teori kinerja Kumorotomo (1996) sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini dinilai lebih operasional dan relevan untuk mengukur kinerja organisasi profit seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfokus pada peningkatan kinerja usaha.

Pertimbangan ini didasarkan pada keunggulan teori tersebut dalam mengintegrasikan aspek-aspek pengukuran kinerja yang holistik, meliputi: (1) kapabilitas organisasi dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, (2) optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai hasil maksimal, (3) kesesuaian aktivitas operasional dengan ekspektasi dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta (4) kemampuan organisasi dalam mengakumulasi pendanaan guna mendukung keberlanjutan operasional dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Setiap perusahaan ingin memiliki kinerja organisasi yang baik. Pada umumnya kinerja organisasi diakibatkan oleh berbagai hal baik internal maupun eksternal. Sebagaimana diungkapkan oleh Lusthaus et al. (2002) dalam buku *A Framework for Improving Performance*, terdapat tiga dimensi utama yang menentukan kinerja organisasi, yaitu:

1. *Organizational motivation*

Motivasi organisasi mencakup aspek sejarah, visi, misi, budaya, serta

insentif atau penghargaan. Hal ini mencerminkan kepribadian mendasar suatu organisasi, yang terbentuk berdasarkan sejarah awal berdirinya organisasi dan bagaimana kegiatan dimulai. Selain itu, visi dan misi berperan sebagai sumber semangat dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga menjadi elemen penting, begitu pula dengan mekanisme pemberian insentif dan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

2. *External environment*

Lingkungan eksternal mencakup aspek administratif, politik, sosial-budaya, teknologi, ekonomi, dan pemangku kepentingan. Faktor-faktor ini menjadi penentu ketersediaan sumber daya dan kemudahan bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dukungan dari lingkungan eksternal sangatlah krusial, sebab tanpa dukungan tersebut, organisasi akan sulit berkembang dan mencapai kemajuan.

3. *Organizational capacity*

Kapasitas organisasi meliputi kepemimpinan strategis, struktur, sumber daya manusia, keuangan, program atau layanan, infrastruktur, teknologi, dan kerja sama antarorganisasi. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini melibatkan sistem dan praktik manajemen yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, serta infrastruktur sebagai pendukung operasional organisasi. Selain itu, strategi pemimpin dalam menentukan arah dan tujuan organisasi diwujudkan melalui manajemen program dan proses. Kapasitas organisasi juga mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan kerja sama, baik antarunit dalam organisasi maupun dengan organisasi lain di luar.

2.5.5 Badan Usaha Milik Desa

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

didefinisikan sebagai lembaga usaha yang kepemilikan sahamnya secara penuh atau mayoritas dimiliki oleh pemerintah desa. Kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme penanaman modal langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dialokasikan secara khusus.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memajukan ekonomi desa secara berkelanjutan.
- b. Memaksimalkan pemanfaatan aset desa demi kesejahteraan masyarakat.
- c. Mendorong partisipasi warga dalam mengelola potensi ekonomi lokal.
- d. Membangun sinergi bisnis antardesa atau dengan mitra eksternal.
- e. Membentuk peluang pasar dan memperluas jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan layanan publik.
- f. Menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat desa
- g. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan umum, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pemerataan kesejahteraan desa.
- h. Meningkatkan pendapatan warga desa sekaligus pendapatan asli desa.

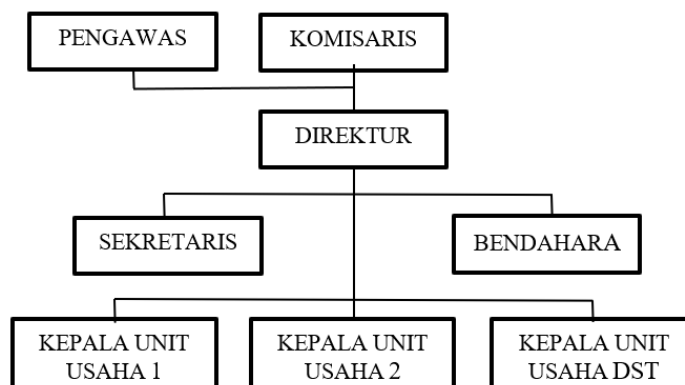
3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Regulasi tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa instrumen hukum berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kerangka pengembangan desa serta mengakui peranan BUMDes dalam mengelola aspek ekonomi masyarakat desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai turunan implementasi dari Undang-Undang Desa, yang memuat ketentuan

teknis terkait tata kelola serta pengembangan operasional BUMDes.

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang memuat prosedur pendirian, tata kelola operasional, serta mekanisme likuidasi BUMDes.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur secara khusus tentang dasar hukum pembentukan dan pengelolaan badan usaha berbasis desa.
4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, diatur bahwa struktur organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus bersifat independen dan tidak terintegrasi dengan struktur pemerintahan desa. Susunan kepengurusan BUM Desa meliputi tiga komponen utama dengan fungsi berbeda:
- a. Penasihat atau komisaris, bertugas memberikan arahan strategis melalui: 1) penyampaian masukan kepada tim operasional dalam pengelolaan BUMDes; 2) penyediaan rekomendasi terkait isu krusial dalam pengembangan usaha; dan 3) pengawasan terhadap implementasi program dan kegiatan BUMDes.
 - b. Pelaksana operasional/direksi, memiliki tanggung jawab dalam: 1) pengelolaan dan pengembangan BUM Desa sebagai institusi pelayanan ekonomi atau layanan publik bagi masyarakat desa; 2) eksplorasi serta optimalisasi potensi usaha desa guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD); dan 3) kolaborasi dengan berbagai lembaga ekonomi desa untuk memperkuat jaringan usaha.
 - c. Pengawas, berwenang mengadakan pertemuan tahunan guna mengevaluasi kinerja BUM Desa, dengan frekuensi minimal satu kali dalam setahun.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.6 Penelitian Terdahulu

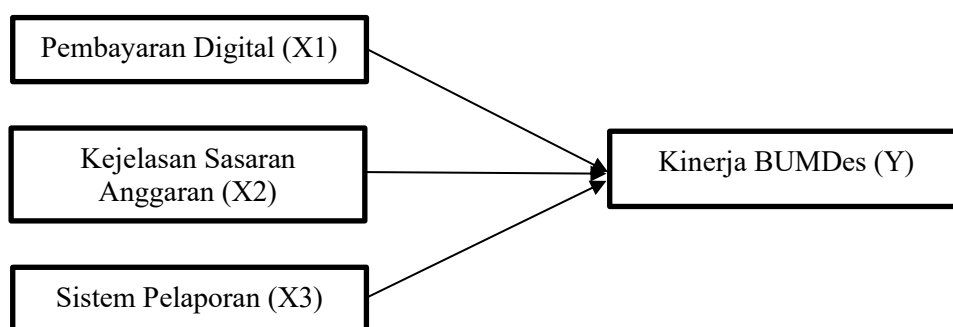
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul,	Variabel	Hasil
1	Gita Mai Rani dan Rika Desiyanti (2024).	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang	Literasi keuangan (X1), Inklusi keuangan (X2), Digital Payment (X3), dan Kinerja UMKM (Y).	Faktor Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan tidak mempengaruhi kinerja UMKM, sedangkan Digital Payment memberikan dampak positif pada kinerja UMKM.
2	Wafiq Asisa, Putri Aulia, Novi Dalianti, dan Yusti Rahayu Handa (2022).	Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar	Literasi keuangan (X1), Kemudahan Digital Payment (X2), dan Kinerja UMKM (Y).	Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM di daerah tersebut.

3	Sausan Syifa Qotrunnada, Adi Wiratno, dan Saras Supeno (2018).	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial	Partisipasi Anggaran (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Komitmen Organisasi (X3), dan Kinerja Manajerial (Y).	Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial PD BPR BKK Purwokerto. Sedangkan, Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial PD BPR BKK Purwokerto.
4	Ira Gustina dan Feni Febriyanti (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir	Akuntabilitas Publik (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem Pelaporan (X3), dan Kinerja Manajerial (Y)	Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
5	Deni Harianto, Kennedy, dan Arumega Zarefar (2021).	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), Sistem Pelaporan (X3), Pemanfaatan	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

		Pemerintah (AKIP)	Teknologi Informasi (X4), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).	Pemerintah.
--	--	-------------------	--	-------------

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Kinerja BUMDes

Pembayaran digital merupakan metode transaksi elektronik yang memanfaatkan platform jaringan dan akun virtual untuk mengonversi uang tunai ke dalam bentuk digital. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran non-tunai melalui berbagai perangkat komunikasi dan jaringan pembayaran modern (Rani & Desiyanti, 2024). Menurut Suryanto dkk. (2022), penerapan metode ini menawarkan berbagai keunggulan, seperti peningkatan efisiensi dalam proses transaksi, pengurangan risiko kesalahan selama pembayaran, serta perluasan akses pasar bagi pengguna. Dengan demikian, pembayaran digital tidak hanya memudahkan aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi juga mendukung transformasi sistem keuangan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap

perkembangan teknologi.

Berdasarkan teori agensi, pembayaran digital berpotensi mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal (pemerintah desa dan masyarakat) dengan agen (pengelola) melalui transparansi transaksi dan pencatatan otomatis. Implementasi pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMDes dengan memangkas waktu transaksi, mengurangi risiko kesalahan administratif, serta memperkuat akuntabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rani dan Desiyanti (2024) dan Asisa dkk. (2022), yang membuktikan bahwa pembayaran digital berdampak positif pada kinerja UMKM.

H₁: Pembayaran Digital (X₁) berpengaruh positif terhadap Kinerja BUMDes (Y).

2.8.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja BUMDes

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut (Astuti dan Mulya, 2019). Adanya kejelasan sasaran anggaran tentunya dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya tugas suatu organisasi sehingga memotivasi pekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Rininda dan Sudaryati, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, kejelasan sasaran anggaran berperan sebagai mekanisme pengendalian yang meminimalkan asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal (pemerintah desa dan masyarakat) dan agen (pengelola BUMDes). Sasaran anggaran yang terdefinisi dengan baik akan meningkatkan transparansi, memudahkan alokasi sumber daya, serta memastikan keselarasan antara rencana operasional dengan tujuan strategis.

Hasil penelitian Qotrunnada dkk. (2018), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan, penelitian oleh Astuti dan Mulya (2019), menunjukkan bahwa kejelasan

sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menduga bahwa terdapat hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja BUMDes. Hipotesis ini didukung oleh teori keagenan dan karakteristik spesifik BUMDes yang memerlukan mekanisme pengendalian ketat untuk memastikan keberlanjutan dan kontribusi sosial-ekonomi bagi desa.

H₂: Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) berpengaruh positif terhadap Kinerja BUMDes (Y).

2.8.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja BUMDes

Sistem pelaporan yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Harianto dan Kennedy (2021), laporan yang baik harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain: relevan dan tepat waktu, andal, serta mudah dipahami. Selain itu, laporan perlu lengkap, objektif, teruji, ringkas, serta terstandarisasi. Dengan memenuhi prinsip ini, laporan tidak hanya komunikatif, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori agensi, sistem pelaporan yang komprehensif berperan sebagai alat monitoring untuk memastikan keselarasan tindakan agen (pengelola BUMDes) dengan kebijakan prinsipal (pemerintah desa dan masyarakat). Mekanisme pelaporan yang transparan dan berkala dapat mengurangi asimetri informasi, memitigasi risiko *moral hazard*, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dkk. (2021), menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, temuan Gustina dan Febriyanti (2020), mengungkapkan bahwa sistem pelaporan juga berdampak positif pada kinerja manajerial di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

H₃: Sistem Pelaporan (X₃) berpengaruh positif terhadap Kinerja BUMDes (Y).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembayaran digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembayaran digital secara teoritis diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasinya pada BUMDes masih menghadapi kendala seperti rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya literasi digital.
2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMDes. Meskipun kejelasan sasaran anggaran dianggap penting dalam kerangka teori agensi sebagai alat pengendalian dan penyaluran tujuan, dalam konteks BUMDes hal ini belum mampu mendorong kinerja secara signifikan. Kemungkinan disebabkan oleh tidak integrasinya sasaran anggaran dengan rencana strategis desa atau kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya.
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes. Temuan ini mengonfirmasi bahwa sistem pelaporan yang baik mencakup ketepatan waktu, akurasi, relevansi, dan aksesibilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pelaporan untuk mengurangi asimetri informasi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada 77 BUMDes dikarenakan sulitnya menjangkau semua BUMDes yang ada di Lampung Selatan.
2. Banyaknya BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan tergolong tidak aktif. Hal ini menyulitkan peneliti dalam memperoleh responden yang memadai dan memengaruhi representativitas sampel.
3. Sejumlah BUMDes sedang dalam proses pergantian pengurus atau kepengurusan yang belum stabil. Kondisi ini mengakibatkan ketidaksiapan pengelola dalam memberikan informasi yang akurat dan konsisten, serta memengaruhi kelancaran proses pengumpulan data.
4. Beberapa pengelola BUMDes menunjukkan keengganan untuk berpartisipasi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya penelitian atau kekhawatiran terhadap evaluasi kinerja.
5. Sebanyak 18 butir pernyataan yang gugur mengindikasikan bahwa rancangan indikator dan kuesioner awal kurang optimal dalam menangkap konstruk yang diukur. Beberapa pernyataan mungkin terlalu abstrak, ambigu, atau kurang kontekstual bagi pengelola BUMDes, sehingga berpotensi mempengaruhi akurasi dan kedalaman data yang diperoleh. Keterbatasan ini menyiratkan bahwa temuan penelitian perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan kelemahan pada instrumen pengukurannya.
6. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang diuji, sehingga terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor penentu lain yang tidak tercakup dalam model.

5.3 Implikasi

1. Bagi BUMDes
Temuan penelitian ini mengarah pada urgensi penguatan sistem pelaporan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMDes. Pengelola disarankan mengimplementasikan sistem pelaporan yang terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh

seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Pelatihan berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam penyusunan laporan keuangan dan non-keuangan yang akuntabel. Meskipun pembayaran digital belum menunjukkan pengaruh signifikan, BUMDes dapat memulai persiapan infrastruktur digital secara bertahap, seperti memperkenalkan transaksi non-tunai pada unit usaha tertentu, sambil terus memantau perkembangan kebutuhan dan kemampuan adaptasi masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini membuka peluang pengembangan studi lanjutan dengan memperluas cakupan variabel yang diteliti, seperti menambahkan faktor kepemimpinan, kompetensi SDM, atau dukungan pemerintah daerah yang mungkin memengaruhi kinerja BUMDes. Selain itu, studi komparatif antar-BUMDes dengan karakteristik usaha yang berbeda dapat mengidentifikasi faktor kontekstual yang spesifik. Eksplorasi variabel mediasi dan moderasi, seperti peran transparansi atau dukungan kebijakan, juga diperlukan untuk memahami mekanisme pengaruh yang lebih kompleks antar variabel.

5.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya agar hasil yang diperoleh lebih menyeluruh:

1. Pengelola BUMDes disarankan untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan dengan memastikan laporan disusun secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas pengelola. Pelatihan pengelolaan keuangan dan adopsi teknologi digital secara bertahap juga diperlukan.
2. Pemerintah daerah disarankan memberikan pendampingan teknis,

memfasilitasi pelatihan, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat kapasitas BUMDes.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbaikan mendalam terhadap instrumen melalui studi pendahuluan kualitatif, uji validitas isi oleh ahli, serta uji coba kuesioner yang lebih komprehensif guna menyusun pernyataan yang lebih kontekstual, jelas, dan sesuai dengan tingkat literasi responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik Pada Dinas Sosial Kota Dumai. *Sorot*, 13(1), 53. <https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5655>
- Albari, A. (2014). Pengaruh Dimensi Keadilan Pelayanan Terhadap Minat Berperilaku Ulang. *Jurnal Siasat Bisnis*, 17(2), 117–130. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol17.iss2.art1>
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>
- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (1), 709–735. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p26>
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Astuti, R. P., & Mulya, H. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Kecukupan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

- (Study Pada Smks Di Kabupaten Tangerang). *Jurnal Profita*, 12(2), 226. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.004>
- Audrey Sazkhya Sinaga, K., Irene, J., & Christanti, R. (2023). Digital Adoption and Financial Performance: Evidence From Indonesian SMES in Food and Beverage Sector. *Return : Study of Management, Economic and Bussines*, 2(04), 423–435. <https://doi.org/10.57096/return.v3i04.94>
- Asisa, W., Aulia, P., Dalianti, N., & Handa, Y. R. (2022). Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Dinamika*, 3(1), 23–50. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i1.23-50>
- Bahri, S. (Ed.). (2021). *Akuntansi sektor publik*. CV. Media Sains Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). Transformasi UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif. *Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia*, 1–18.
- Bekti, A. I. T., & Fatoni, F. (2025). Pengaruh perceived organisational support dan work-life balance terhadap organisational citizenship behaviour. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(1), 79-93. <https://doi.org/10.26740/jim.v13n1.p79-93>
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: background and epistemology. *Journal of Management History*, 22(4). <https://doi.org/10.1108/JMH-06-2016-0028>
- Bps.go.id. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2020. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/03/05/10f5448be62f4370c7146697/statistik-keuangan-pemerintah-des-2020.html>
- Bps.go.id. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/14/41fe670547b1fb350d729e31/statistik-keuangan-pemerintah-des-2021.html>
- Bps.go.id. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2023. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/01/17/91ea10597925d8f615b05e6e/statistik-keuangan-pemerintah-des-2022-dan-2023.html>
- Budiyasa, I. K., & Trisna Dewi, N. A. W. (2023). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kecukupan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Bumdes (Studi Empiris Pada Bumdes di Kecamatan Sawan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 500–512. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.50066>
- Cappelli, P., & Conyon, M. J. (2018). What Do Performance Appraisals Do? *ILR Review*, 71(1), 88–116. <https://doi.org/10.1177/0019793917698649>
- Chen, B., & Ren, J. (2022). Does the Adoption of Digital Payment Improve the Financial Availability of Farmer Households? Evidence from China. *Agriculture (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/agriculture12091468>
- Daft, R. L. (2022). *Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan Aplikasinya di

- Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21 (2), 151–164.
- Denisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance Appraisal and Performance Management: 100 years of progress?. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 421–433. <https://doi.org/10.1037/apl0000085>
- Duryadi. (2021). Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Economics and Law, 18(5), 134–147.
- Estuningrum, L. E., & Dharma, I. G. B. B. (2022). Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Behavioral Intention Mahasiswa Untuk Mengikuti Perkuliahan Tatap Muka Selama Pandemi Covid-19. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(2), 208. <https://doi.org/10.20961/performa.21.2.59228>
- Egim, A. S., Zulfahri, L., Imtihan, I., & Fermayani, R. (2023). Meningkatkan Keputusan Pembelian Konsumen melalui Tangible, Kehandalan (Reliability) dan Daya Tanggap (Responsiveness) dalam Pelayanan. *Jurnal Ecogen*, 6(3), 389. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i3.15302>
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory : An Assessment and Review*. 14(i).
- Furiady, O., & Kurnia, R. (2015). The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and Objectivity towards Audit Quality. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 328–335. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.042>
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0. Universitas Diponegoro Semarang.
- Goldwin, Rostina, C. F., Nazmi, H., Meilissa, & Zebua, E. V. U. (2019). Pengaruh Kepuasan Kerja Danmotivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tanimas Soap Industries (Perusahaanmanufaktur Dan Eksportir Sabun). *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 4(1), 36–45. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRMB/article/download/1392/1084>
- Gustina, I., & Febriyanti, F. (2020). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 24–36.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Harahap, A. T. (2017). Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Warta*, (53), 1–14. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.267>
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran

Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>

Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 411–432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>

IAPI. (2021). Kode Etik. Kode Etik Akuntan Indonesia, 259.

IASB. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting (2018) – 2021 Issued IFRS Standards (Part A). Business Accounting, September 2010, 86. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-framework-for-financial-reporting.pdf>

Keng-Soon, C., Choo Yen-San, W., Pui-Yee, Y., Hong-Leong, C., & Teh Shwu-Shing, J. (2019). an Adoption of Fintech Service in Malaysia. *South East Asia Journal of Contemporary Business*,

Konte, M., & Tetteh, G. K. (2023). Mobile money, traditional financial services and firm productivity in Africa. *Small Business Economics*, 60(2), 745–769. <https://doi.org/10.1007/s11187-022-00613-w>

Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi Dan Kebijakan Deregulasi. JKAP Volume 1 Nomor 1 (Mei 1996).

Laksana, A. P., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 177–186. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4179>

Ledi, K. K., Ameza-Xemalordzo, E., Amoako, G. K., & Asamoah, B. (2023). Effect of QR Code and Mobile Money on Performance of SMEs in Developing Countries. The role of dynamic capabilities. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2238977>

Li, Y. (2016). Empirical Study of Influential Factors of Online Customers' Repurchase Intention. *IBusiness*, 08(03), 48–60.

Listyorini, P. I. (2018). Penilaian Kualitas Data Rutin Program Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. *INFOKES: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 8 (1), 6–15. ISSN: 2086-2628.

Liya Triyani, Nurrina Zulfa, Dinda Adilla, Aria Mahardika, & Silvia Afnes. (2023). Individual Performance As a Factor for Increasing Employee Productivity. *Journal of Psychology and Social Sciences*, 1(3), 98–107. <https://doi.org/10.61994/jpss.v1i3.100>

- Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Pusaka Almailda.
- Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- Manuel, N. R., & Julindrastuti, D. (2023). Pengaruh Fitur Layanan dan Perceived Quality Terhadap Keputusan Pembelian Shopee di Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Marginingsih, R. (2017). Tata Kelola Manajemen Risiko Pada PT Unilever Indonesia, Tbk. *Cakrawala*, XVII(2), 157–158.
- Merawati, L. K. (2019). Budgetary Goal Characteristics dan Transparansi Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.246>
- Moti, D. B., & Walia, N. (2020). The Effects of Compatibility, Social Influence, and Perceived Ease of Use on Perceived Usefulness of Mobile Payment Services. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 1865–1873.
- Ningrum, N. S., & Budiani, M. S. (2023). Hubungan antara Perceived Usefulness dengan Kepuasan Pelanggan pada Pengguna Aplikasi Kesehatan X. *Jurnal Psikologi Udayana*, 10(1), 261. <https://doi.org/10.24843/jpu.2023.v10.i01.p06>
- Nugroho, T. (2020). Performance Analysis of Village-Owned Enterprises Based on Financial and Management Aspects in Blitar Regency, East Java. *Habitat*, 31(2), 64–77. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2020.031.2.8>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pangestuti, R., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2020). Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Subsektor Transportasi Terdaftar di BEI. *Owner*, 4(1), 164. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.199>
- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Owner*, 6(4), 4108–4112. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, B. R. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 3. Widya Gama Press.
- Puspitosari, I., Meilani, S. E. R., & Wijayati, F. L. (2019). Tingkat Relevansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Qardin*, 4, 115–128.
- Putri, N. T., Satria, B., Amrina, E., & Alfadhlani, A. (2021). Pengaruh Kualitas layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa dengan Moderasi Budaya Organisasi dan Reputasi. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 10(2), 121–130.

<https://doi.org/10.26593/jrsi.v10i2.4200.121-130>

- Qotrunnada, S. S., Wiratno, A., & Supeno, S. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.1.1201>
- Rachman, M. M. (2021). The Impact of Work Stress and the Work Environment in the Organization: How Job Satisfaction Affects Employee Performance? *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 09(02), 339–354. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2021.92021>
- Ramadhan Reza, & Herianingrum Sri. (2017). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas, Dan Persepsi Harga Terhadap Niat Nabasah Menggunakan Layanan Mobile Banking (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(6), 478–492.
- Rani, G. M., & Desiyanti, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(02), 161–174. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v5i02.1403>
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1099–1113. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.a30.i05.p03>
- Rizky, M., & Islahuddin, I. (2023). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Bumn Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 105–114. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.21144>
- Samsuddin. (2016). KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Dinas Kependuduk-an dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 314–322. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.314-322>
- Sanjaya I Made Dwi Marta, & Wirawati Ni Gusti Putu. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *E-Jurnal Akuntansi*, 15.1, 17–26.
- Saraswati, I. G. A. A. P., & Rahyuda, I. K. (2021). Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Trust Terhadap Repurchase Intention. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(2), 61–72. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Sari, I. M., Intihanah, & Musa, M. A. A. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 6(2), 50–

65. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho/issue/archive>

- Serambi, J., Mubarak, M. N., Saddam, M., & Rasmana, I. (2024). *Identifikasi dan Manajemen Risiko Operasional, Pasokan*, 8(1), 282-288.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>
- Sinollah, S., & Masruroh, M. (2019). Pengukuran Kualitas Layanan (Servqual-Parasuraman) Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 45–64. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.285>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syabila, N. A., & Khasanah, I. (2023). Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Dan Risiko Terhadap Minat Berkelanjutan Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel. *Diponegoro Journal of Management*, 12, 1–15.
- Tyas, E. I., & Darma, E. S. (2017). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, dan Actual Usage Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi: Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi dan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 25–35.
- Utami, H. R., & Haryati, T. (2023). Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi. *Jambura Economic Education Journal*, 5(2), 100–111. <https://doi.org/10.37479/jeej.v5i2.18963>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73–85.
- Yadav, P. D., Madhukar, V., Dhamija, A., & Manrai, R. (2025). Understanding Behavioral Intentions of UG and PG students in Tier II Indian Cities Toward AI-Technology Adoption in Higher Education: a Mixed-Methods Approach using the SOR model. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2476044>
- Yuniarti, R. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.93>
- Zuhrohtun. (2016). *Pengelolaan BUMDES di Era RI 4.0*. 1–23.